

BAB 4

TRANSFORMASI STRATEGI PERTAHANAN LAUT NUSANTARA

Salah satu teori perbatasan adalah dari perspektif regionalisme. Analisis terhadap peran dan keberadaan Kapal perang dan pesawat AL di Ambalat dapat dikorelasikan dengan kondisi wilayah perbatasan Indonesia di sana, serta berbagai kepentingan nasional yang harus diamankan di wilayah itu. Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu.⁷⁰ Untuk menelaah keamanan regional secara lebih mendetail, terdapat dua paham yang dapat dikombinasikan, yaitu perspektif realis dan institusionalis (idealis). Perbedaan utama di antara kedua paham ini adalah perbedaan aspek terpenting dalam menentukan keamanan regional. Kaum realis memandang bahwa militer adalah faktor terpenting dari keamanan, hal ini dapat dianalogikan dengan Corbett. Sementara itu, pihak institusionalis mengatakan tidak hanya militer saja yang merupakan aspek terpenting dari keamanan regional, tetapi juga bidang politik dan sosial.⁷¹ Hal ini dapat dianalogikan dengan teori Mahan. Oleh karena itu, kolaborasi dari kedua perspektif ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang berkembang di wilayah Ambalat.

Aktivitas pengamanan wilayah perbatasan merupakan upaya perlindungan eksistensi negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk, dan wilayah dari pelbagai jenis ancaman. Konsepsi ini adalah bagian dari suatu pemahaman mengenai keamanan nasional, yang intinya adalah “kemampuan negara melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai-nilai inti (*core values*), di mana pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus, dengan

⁷⁰ Craig Snyder, *Contemporary Security and Strategy*, Palgrave : Macmillan. 2008.p228.
<http://skiasyik.wordpress.com/2008/03/25/teori-regionalisme/>

⁷¹ <http://antarksa2010.blogspot.com/2010/05/teori-perbatasan.html>

menggunakan segala elemen *power* dan *resources* yang ada, serta melingkupi semua aspek kehidupan.⁷²

4.1 Transformasi kelemahan 6 komponen Mahan

Gambar 4.1: Konsep Pertahanan Nusantara



Sumber: Laksamana Pertama TNI Ir. Sudjiwo MSc, Dirjakstra Ditjen Strahan, Pemanfaatan Potensi Samudera Hindia Bagi Kepentingan Pertahanan Negara, 2005⁷³

Dari gambar diatas dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Geografi. Syarat geografi meliputi posisi geografi dan konfigurasi wilayah yang memungkinkan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan serta pangkalan-pangkalan, dan luas wilayah perairan dikaitkan dengan potensi sumber daya alam kelautan yang dimiliki. Geografi dikategorikan luas, tapi di kawasan Ambalat, disatu sisi dikatakan strategis kalau dapat dimanfaatkan secara penuh, namun demikian juga lemah terhadap infiltrasi dan sabotase lawan karena luasnya daerah dengan sarpras yg dimiliki tidak cukup. Agar SPLN

⁷² DR. Yani Antariksa. Teori Perbatasan <http://antariksa2010.blogspot.com/2010/05/teori-perbatasan.html>

⁷³ Laksamana Pertama TNI Ir. Sudjiwo MSc, Dirjakstra Ditjen Strahan, Pemanfaatan Potensi Samudera Hindia Bagi Kepentingan Pertahanan Negara, 2005

bisa dilaksanakan secara baik dengan menggunakan teori Mahan, maka pangkalan, sarpras pelabuhan, lanud di sekitar Ambalat yaitu di Tarakan, Nunukan, Toli-toli, Bitung, dan Palu harus dipenuhi, sehingga dapat meningkatkan dukungan 5R (rest, repair, refuelling, replanishment, recreation). **Pelabuhan-pelabuhan tersebut baik pelabuhan militer dan pelabuhan sipil faktanya berdampingan dan bahkan ada yang menjadi satu sehingga pemenuhan failitas pelabuhan militer dan umum akan dapat mendukung SPLN.** Pangkalan juga merupakan salah satu komponen dari SSAT, dan juga harus mampu melaksanakan fungsi pendukung berupa fasilitas labuh, fasilitas pemeliharaan, fasilitas perbekalan, perawatan personel dan pembinaan pangkalan laut itu sendiri. Sebagai pendukung maka pangkalan memiliki bermacam jenis dan bentuk fasilitas agar kapal, pesud dan AL mampu melaksanakan tugas operasionalnya sebaik mungkin.⁷⁴

2. Luas wilayah dan posisi wilayah di dekat-dekat Ambalat sarprasnya masih kurang, luas area yang di-cover tidak seimbang dengan armada yang dimiliki (kalau lawan lebih kuat, kita kalah, apabila diukur dengan kekuatan yang ideal). Dalam Ambalat, dengan pangkalan Aju di daerah Toli-toli atau Palu, Bitung atau Tarakan sehingga secara strategis jaraknya lebih menguntungkan daripada pihak Malaysia.
3. Jumlah dan karakter penduduk, setelah peristiwa provokasi Malaysia di Ambalat tahun 2005 banyak masyarakat yang secara sukarela mendaftarkan diri utuk siap berperang di Ambalat melawan Malaysia, hal ini juga didukung oleh masyarakat pesisir laut seperti di Makasar, atau di daerah Sulawesi lainnya. Dari peristiwa ini tumbuh semangat utuk tidak mau kehilangan wilayahnya lagi seperti pada peristiwa Sipadan-Ligitan. Semangat jiwa persatuan dan kesatuan Indoesia inilah yang menjadi pusat kekuatan "Center of Gravity" yang ditakuti oleh Malaysia.⁷⁵

⁷⁴ Kebijakan Strategis Kasal tentang pengembangan pangkalan TNI AL utk mewujudkan stabilitas keamanan daerah dalam rangka tetap tegaknya NKRI, Jakarta 2007

⁷⁵ pusjianstraTNI,2010

4. Watak bangsa. Dengan mind set bahwa negara Indonesia adalah negara maritim, maka orientasinya haruslah archipelagic oriented
5. Sikap pemerintah. Dari pemerintah Indonesia tekadnya sudah bulat bahwa Ambalat harga mati milik NKRI.⁷⁶ Tekad bulat pemerintah sayangnya tidak diikuti dengan penambahan anggaran yang signifikan bagi TNI untuk dapat mengimbangi kuat angkatan bersenjata Malaysia. Demikian juga kebijakan pemerintah masih land based oriented, belum maritime based oriented atau archipelagic base oriented. Bidang kelautan sudah mulai ada sejak zaman Gusdur hingga sekarang, dimana sektor kkelautan telah terwadahi yaitu dibentuk menteri kelautan dan perikanan namun masih terlalu banyak kepentingan di laut yang masih harus ditangani sehingga realisasinya masih jauh dari harapan.⁷⁷ Mencermati RPJMN pembangunan nasional Indonesia masih kurang mewadahi aspek kelautan sehingga adalah sangat wajar bila berbagai aktivitas masyarakat fokus ke darat, seolah-olah ruang lingkupnya hanya di darat.⁷⁸ Hal itu ditandai dengan pembangunan yang masih bersifat continental oriented atau land based oriented, dimana perhatian pemerintah terhadap pembangunan kelautan masih kurang dan masih adanya kekosongan tertib maritim serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sektor kelautan masih sangat rendah yang ditandai dengan rendahnya investasi di bidang ini.

Pembangunan di Indonesia sampai saat ini masih berorientasi kontinental. Ini ditandai dengan ketersediaan anggaran untuk pembangunan sektor darat masih mendominasi anggaran belanja negara sampai dengan tahun 2010 walaupun diakui bahwa semenjak adanya DKP terlihat peningkatan upaya pembangunan

⁷⁶ Ambalat Harga Mati milik NKRI, Kompas, 2005

⁷⁷ Nono Sampono, makalah pengaruh kesadaran geografi dalam pengembangan potensi kelautan menuju kejayaan Indonesia, disampaikan pada pembekalan pasis Seskoal Angkatan XXXXV TA 2007

⁷⁸ -----, makalah perspektif pengembangan potensi kelautan Indonesia masa depan, disampaikan kepada international symposium on management of aquatic and marine environment, Andalas University, Padang, 2007

sektor kelautan, namun upaya itu belum cukup⁷⁹ (sumber RPJMN Bappenas). Kapasitas suatu ruang hidup bangsa sangatlah ditentukan oleh faktor manusia yang mendiaminya, yang menjadikan ruang suatu benda mati menjadi hidup dan bermakna politik. Indonesia adalah negara kepulauan oleh karenanya wilayah nasionalnya atau ruang hidupnya merupakan kesatuan wilayah darat/pulau dan laut dimana secara teritorial dan berdaulat penuh mencakup batas 12 mil dari pulau terluar, dan 200 mil sebagai batas ekonomi. Namun kondisi saat ini segala aktivitas masyarakat bangsa Indonesia lebih diorientasikan ke darat, artinya ruang hidup bangsa Indonesia masih sebatas wilayah daratan/pulau.⁸⁰ Untuk menyatukan langkah dan pandangan bangsa Indonesia dalam memanfaatkan laut untuk kejayaan bangsa di masa depan diperlukan visi Bangsa Indonesia dalam bangsa maritim terbesar di dunia, mampu memanfaatkan laut yang dikaruniakan oleh Tuhan YME sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta tumpuan masa depan demi kesejahteraan bersama.⁸¹

Watak bangsa yang bervisi maritim itu dilihat dari seberapa besar bangsa itu menaruh perhatian pada maritim, mempunyai visi maritim dan melaksanakan dalam program pembangunannya. Demikian juga dalam pemerintah itu seberapa besar perhatian mereka dalam bidang kelautan untuk menentukan bijak pembangunannya demi kesejahteraan bangsa, apabila dilihat dari kondisi RPJPM sekarang ini salah satu sasaran yaitu **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan

⁷⁹ Opcit, hal. 5

⁸⁰ Nono Sampono, pandangan akademik, rekayasa sosial masa lalu dan pengaruhnya terhadap optimalisasi pembangunan nasional dalam memanfaatkan ruang hidup bangsa Indonesia masa depan, Jakarta, 2008

⁸¹ Mabasal, Konsep Kebijakan Maritim Indonesia, Surabaya, 2001 dan Visi Maritim Indonesia dalam bingkai wawasan nusantara, 2006

kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.⁸² Namun faktanya besaran anggaran prosentasenya masih kecil kemudian implementasi di tingkat provinsi dan kabupaten pembangunan kelautan beserta sarana dan prasarannya belum merupakan prioritas.

Gambar 4.2: Strategi Pertahanan Negara Matra Laut



Sumber: Pusjianstra TNI 2010

Strategi Maritim : Metoda yang digunakan negara dalam memelihara atau meningkatkan kekuatan laut dan bagaimana negara mencoba menggunakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam masa damai dan masa perang.

⁸² Bappenas, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Buku I Prioritas Nasional, Jakarta, 2010 hal. 24

Kekuatan laut (Sea Power) “: Kekuatan (power) atau pengaruh yang diperoleh dengan penggabungan militer (terutama AL, bersama AD dan AU) dengan kekuatan non militer.

Strategi maritim diformulasikan berdasarkan elemen-elemen dasar kekuatan nasional (politik, ekonomi, sosial budaya, militer) yang dapat didayagunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara.

Strategi Maritim = seni dan sains yang mengkoordinasikan pembangunan dan penggunaan instrumen kekuatan nasional untuk mencapai tujuan pertahanan negara.

Bagi negara maritim baik secara teoritik maupun apa yang seharusnya, kekuatan nasional sangat dipengaruhi oleh geopolitik, geososial, geo ekonomi yang terpantau pada geo-strateginya yang kemudian akan mempengaruhi 6 komponen tingkat nasional negara tersebut, yaitu

Geografi, posisi wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, watak bangsa, dan sikap pemerintah.

4.2 Transformasi kelemahan komponen Corbett

Dalam komponen Corbett ada 3 komponen, yaitu decisive battle, blokade dan fleet in being. Untuk sekarang ini yang dilakukan di Ambalat adalah dengan fleet in being. Angkatan Laut mampu untuk melaksanakan unsur pemutus garis perhubungan lawan sebagai implementasi dari decisive battle dan fleet in being yaitu dengan sub komando tugas gabungan laut gabungan (Subkogasgablaga) 1/Timur. Dan sub komando tugas gabungan laut gabungan (Subkogasgablaga) 2/Darat. Sebagai power projectionnya dengan cara sub komando tugas gabungan amfibi (Subkogasgabfi).⁸³ Untuk mencapai ini Strategi Pengendalian Laut (Dalla). Menjamin penggunaan laut untuk kepentingan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh lawan atau untuk kepentingan lawan. Kegiatan operasi yang dilaksanakan berupa:

- a) Operasi pemutusan garis perhubungan laut lawan.
- b) Operasi Laut sehari-hari, seperti operasi keamanan laut dan penegakan hukum di laut maupun operasi laut lainnya.

⁸³ Kemenhan RI, MEF Komponen Utama, Jakarta, 2010

- c) Operasi siaga tempur laut, berupa operasi untuk peran *naval diplomacy* dan *naval presence* untuk memberikan efek penangkalan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Kep/06/VI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Kebijakan Dasar Pembangunan Kekuatan TNI Angkatan Laut sampai dengan Tahun 2013 (*Blue Print* TNI Angkatan Laut s.d. 2013). Merupakan kebijakan yang dibuat sebagai pedoman dalam pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut sampai dengan tahun 2013 yang berisi upaya pengadaan alutsista yang meliputi KRI/KAL, Pesud dan Ranpur Marinir serta Pangkalan sesuai kebutuhan. Kekuatan ideal yang diharapkan adalah 190 KRI, 157 KAL, 67 Pesud dan 488 Ranpur Marinir.

Selain itu Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut yang lainnya Nomor : Kep/2/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Kebijakan Strategis Kasal dalam Mewujudkan Postur TNI Angkatan Laut sampai dengan tahun 2024, merupakan kebijakan yang disusun untuk dapat memproyeksikan kekuatan ke darat tiga Batalyon Tim Pendarat (BTP) pada dua *Trouble Spot/Hot Area* dalam waktu yang bersamaan. Selain itu juga harus mampu melakukan kegiatan penegakan hukum, penjagaan keamanan laut dan tugas-tugas OMSP serta dukungan lainnya.

Dalam perhitungan MEF untuk mengatasi provokasi AL Malaysia di Ambalat bisa dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur seperti:

1. Unsur PGPLL, yang terdiri dari:
 - a. Sub Komando Tugas Gabungan Laut Gabungan (Subkogasgablaga) 1/Timur. Dalam rangka memutus garis perhubungan laut lawan dengan skenario pergeseran kekuatan laut lawan dari pangkalan laut di Teluk Sepanggar (Sabah Malaysia Timur) menuju *Hot Area* (Ambalat) melalui Laut Sulawesi dengan kekuatan 2 KS, 6 Korvet, 4 KCR, 1 BCM dan beberapa kapal bantu lainnya. Untuk memutus kekuatan laut lawan tersebut maka dibutuhkan unsur-unsur 19 KRI berbagai jenis terdiri : 4 PKR, 8 KCR, 1 BCM, 2 KS, 2 PR/BR, 2 Trimaran dan 6 pesud terdiri dari 2 Pesud Patmar serta 4 Heli AKPA/AKS, diperkuat dengan 2 Tim Paska.

b. Sub Komando Tugas Gabungan Laut Gabungan (Subkogasgablaga) 2/Barat. Dalam rangka memutus garis perhubungan laut lawan dengan skenario pergeseran kekuatan laut lawan dari pangkalan laut di Lumut (Semenanjung Malaysia Barat) menuju Teluk Sepanggar (Sabah Malaysia Timur) melalui Laut Natuna/Laut Cina Selatan dengan kekuatan 2 Fregat, 5 Korvet, 4 KCR dan 1 BCM. Untuk memutus kekuatan laut lawan tersebut maka dibutuhkan unsur-unsur 19 KRI berbagai jenis terdiri : 4 PKR, 8 KCR, 1 BCM, 2 KS , 2 PR/BR, 2 Trimaran dan 6 pesud terdiri dari 2 Pesud Patmar serta 4 Heli AKPA/AKS, diperkuat dengan 2 Tim Paska.

c. Sub Komando Tugas Gabungan Amfibi (Subkogasgabfibi). Untuk melaksanakan operasi amfibi pada satu *trouble spot* dibutuhkan kekuatan 1 BTP Marinir yang terdiri dari : 1.745 personel, 17 Tankfib, 50 Ranratfib, 10 Kapa, 14 Kendaraan Arhanud, 9 Meriam 105/122, 6 Meriam, Albes, Ranmor dan Rantis lainnya. Untuk mengangkut kekuatan 1 BTP Marinir maka dibutuhkan unsur-unsur 24 KRI berbagai jenis dengan rincian sebagai berikut: 6 AT, 1 MA, 2 LPD, 1 BAP, 2 BCM, 1 BRS, 1 TDS, 2 BR, 6 PKR, 2 PK, 8 Pesud berbagai jenis terdiri dari 4 Heli Angkut, 2 Pesawat Angkut Taktis dan 2 heli *escort*. Untuk Operasi Khusus / Operasi Aju dibutuhkan 3 Tim Pasukan Laut Khusus TNI Angkatan Laut (Paska/Taifib/Denjaka).

d. Sub Komando Tugas Gabungan Pendaratan Administrasi (Subkogasgabradmin). Untuk melaksanakan operasi Ratmin pada satu *trouble spot* dibutuhkan kekuatan 1 BTDA TNI AD (1.000 s.d. 1.500 personel) yang diangkut dengan unsur-unsur 16 KRI berbagai jenis dengan rincian sebagai berikut : 5 AT, 1 LPD/MA, 1 BAP, 5 PK, 1 BCM, 1 TDS, 1 ASG, 1 BU serta 2 Heli Angkut Taktis.

e. PPRC. Untuk melaksanakan operasi PPRC dibutuhkan kekuatan 1 BTP Marinir (1.300 personel) dengan rincian 35 Ranpur

sebagai berikut : 5 Tankfib, 15 Ranratfib, 5 Ran Arhanud, 5 Kapa, 5 Roket Multi Laras. Dibutuhkan unsur-unsur angkut terdiri dari 10 KRI (4 AT, 1 LPD/MA, 1 BCM, 2 PKR dan 2 PK), 6 Pesud (2 heli angkut, 2 heli *escort* dan 2 heli AKPA/AKS) serta 2 Tim Taifib.

f. Operasi dalam rangka Kehadiran di laut (*Naval Presence*). Menggunakan kekuatan dari unsur-unsur Subkogasgablaga timur dan barat serta kekuatan perbantuan.

g. Operasi Keamanan Laut. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di laut, maka perlu dilaksanakan kegiatan operasi Kamla/Penegakan Hukum sebagai jaminan keamanan pelayaran di laut. Susunan kebutuhan kekuatan tersebut adalah terdiri dari 44 FPB/PC dan 9 Pesud Patmar. Kebutuhan kapal-kapal tersebut dipadukan dengan rencana pemanfaatan 18 stasiun radar pantai yang akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut (*coastal surveillance system* yang tergabung dalam IMSS/*Integrated Maritime Surveillance System*).

h. Kekuatan Paslasus.

- 1) Denjaka terdiri dari 1 Detasemen.
- 2) Kopaska terdiri dari 2 Satuan terdiri dari masing-masing 12 Detasemen.
- 3) Taifib terdiri dari 2 Yon.

i. Operasi yang bersifat Perbantuan. Dalam rangka mendukung operasi militer selain perang (OMSP) dan sebagai kekuatan cadangan maka dibutuhkan kekuatan yang sewaktu-waktu siap ditugaskan ke daerah operasi dengan rincian kekuatan sebagai berikut : 19 KRI (4 AT/Repair, 2 BAP, 4 KCR, 3 BHO, 3 LAT, 1 BRS/AT Container Medis, 1 BU, 1 ASG), 17 Pesud (2 Pesud Patmar, 5 Pesud Angkut, 6 Pesud Latih dan 4 Heli Latih) dan 86 Ranpur (46 Tankfib, 15 Ranratfib, 10 kendaraan Arhanud, 10 KAPA dan 5 Roket Multi Laras).

j. Cadangan Kekuatan Pasukan Marinir. Kekuatan Marinir yang disiapkan untuk sewaktu-waktu ditugaskan menghadapi situasi krisis, sebagai berikut:

- 1) 1 BTP (1.745 personel) dilengkapi dengan 50 Ranpur berbagai jenis.
- 2) 1 Batalyon Infanteri Siaga Ibu Kota (*Stand by Force*) terdiri dari 250 personel dilengkapi dengan 15 Ranpur berbagai jenis.
- 3) 1 Batalyon Tugas Kamdagri/Tugas Lainnya terdiri dari 914 personel dilengkapi dengan 50 Ranpur berbagai jenis.

k. Kekuatan Pangkalan. Dibutuhkan pangkalan-pangkalan yang mampu mendukung kegiatan operasi di jajaran Lantamal III, IV, V, VI, VIII dan XI.

l. Kekuatan Yonmarhanlan. Dibutuhkan batalyon-batalyon Marinir di Lantamal III, IV, V, VI, VIII dan XI yang dapat melaksanakan pertahanan pangkalan dengan kemampuan persenjataan yang lengkap.

Strategi maritim adalah asas-asas dimana pemerintah yang berperang yang menempatkan laut sebagai faktor penting. Strategi perang laut termasuk di dalamnya tetapi sebagai bagian yang menjelaskan manuver armada ketika strategi maritim menentukan bagian armada mana yang harus bermain dalam aksi kekuatan darat. Jenis strategi militernya antara lain, air strategy, maritime strategy dan continental strategy.

Corbett memperjelas teori Mahan dan sekaligus mengoreksinya bahwa menguasai laut secara mutlak sulit untuk dilaksanakan, oleh karena itu Corbett memuat teori pengendalian laut.

Selain itu, beberapa teori pendukung dari teori Corbett antara lain:

Teori pengendalian laut menurut Laksamana Eccles adalah :

- 1) Pengendalian mutlak (penguasaan laut) kita bebas untuk beroperasi tanpa dihalang halangi. Musuh tidak dapat beroperasi sama sekali didaerah itu.

- 2) Pengendalian Kerja. Kita bebas beroperasi pada tingkat kebebasan yang lama. Musuh hanya dapat beroperasi di daerah tersebut dengan resiko yang besar.
- 3) Pengendalian dalam pertikaian. Masing-masing pihak beroperasi dengan menghadapi berbagai resiko, akibatnya perlu mengusahakan pengendalian kerja untuk bagian-bagian daerah laut yang terbatas dan dalam waktu yang terbatas pula bagi pelaksanaan operasi operasi khusus. Pengendalian kerja oleh musuh. Sebaliknya dari no 2. Pengendalian mutlak oleh musuh, sebaliknya dari no 1.

Teori pengendalian laut menurut Laksamana Standfield Turner adalah:

- 1) Pengendalian laut itu meliputi daerah daerah laut yang terbatas dan untuk jangka waktu yang terbatas pula. Tidak mungkin lagi mencegah penggunaan laut secara total bagi musuh kecuali dalam keadaan khusus yang sangat terbatas.

Dewasa ini hanya mungkin mengendalikan laut , udara dan bawah permukaan suatu daerah, sementara kita menggerakkan kapal kapal menuju suatu posisi untuk memproyeksikan kekuatan kedarat atau untuk membekali kekuatan kekuatan diseberang laut.

- 2) Laut mempunyai dua dimensi yang saling berkomplementer, yaitu:
 - a) Sea assertion atau Sea exertion (Penggunaan Laut).
 - b) Sea Denial (Pencegahan penggunaan laut). Untuk Sea Denial tujuannya bukan untuk menggunakan laut bagi keperluan sendiri, tetapi untuk mencegah musuh menggunakannya.
- 3) Pengendalian laut dalam hal Sea Assertion adalah:
 - untuk mengamankan suplai-suplai industri (bahan mentah, bahan bakar, dsb). Untuk memperkuat /mensuplai satuan satuan militer yang bertugas di seberang laut.
 - Untuk memberi suplai suplai ekonomi /militer kepada sekutu di waktu perang.

- Untuk memberi perlindungan kepada satuan satuan Angkatan Laut didalam melaksanakan peranannya memproyeksikan kekuatan tempur kedarat.

Teori Corbett ini supaya SPLN kuat maka unsur-unsur kekuatan laut harus kuat. Oleh karena itu kekuatan Indonesia, AL dan AU termasuk AD harus 3x kekuatan militer Malaysia (secara konvensional). Sedangkan menurut Connie R. bakrie kekuatan militer kita harus 5-7x kekuatan militer Malaysia.⁸⁴

Kelemahan teori ini di Ambalat bahwa kuat AL berhubungan dengan kuat AD. Penyerangannya bersamaan secara ofensif dan defensif. Dalam kasus Ambalat tidak bisa dilaksanakan kecuali perangnya adalah total antara Malaysia dan Indonesia. Namun bisa dilaksanakan apabila :

1. Strategi yang fleksibel dengan didukung oleh kapal kapal besar serta kapal-kapal kecil yang lincah akan lebih mendayagunakan penggunaan kekuatan.
2. Menitik beratkan kepada perlunya dilaksanakan operasi-operasi yang fleksibel guna mengendalikan perhubungan maritim.
3. Pertahanan merupakan situasi dimana kegiatan kegiatan dibatasi/dikendalikan, bukan seperti keadaan istirahat. Kelemahannya adalah bahwa bila hal tersebut berkepanjangan akan dapat mematikan semangat ofensif.

Dari segi Angkatan Laut guna menghadapi provokasi Malaysia, berikut merupakan uraian singkat mengenai tugas pokok TNI AL sesuai dengan UU no 34 tahun 2004 Tentang TNI, Tugas TNI AL adalah :

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
- 2) Melaksanakan tugas TNI dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- 3) Melaksanakan tugas TNI untuk tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.

⁸⁴ Connie R. Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta, 2007

- 4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
- 5) Melaksanakan tugas TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Sementara tugas TNI sesuai pasal 7 UU tentang TNI tahun 2004 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indoensia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁸⁵

Untuk melaksanakan tugas di Ambalat sesuai dengan pasal 9 Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi AL dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah.⁸⁶

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan Angkatan Laut yang kuat, Besar dan Profesional. Menurut *Rear Admiral J.R. Hill* dalam bukunya *Maritime Strategy for Medium Powers* mengungkapkan tentang strategi yang harus dilakukan oleh Negara *Medium Powers* seperti Indonesia dalam rangka *sea command* dan *sea control* (penguasaan dan pengendalian) laut wilayah yurisdiksi nasional negaranya, dimana luas perairan sangat besar dan tidak sebanding dengan jumlah kapal atau armada Angkatan Lautnya, maka strategi yang dianjurkan adalah pengawasan pada selat-selat perbatasan. Pengendalian laut dilakukan dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan strategik, pengawasan selat-selat kunci, dan melindungi armada niaga penting. Pengendalian laut tersebut, ditujukan terhadap lawan dan bakal lawan dimana konflik yang timbul di laut adalah melalui empat media yaitu Atas Air, Bawah Air, Udara dan Luar Angkasa. Berdasarkan teori tersebut di atas, maka pengendalian laut di Indonesia ditujukan pada selat kunci (corong strategik) dengan sasaran pokok dua spektrum ancaman yaitu kapal atas air dan kapal selam. Dengan pilihan strategi ini sangatlah tepat bila keamanan di daerah ALKI merupakan faktor yang sangat penting untuk

⁸⁵ Pasal 7 UU TNI no. 34 tahun 2004 ttg TNI, hlm. 21-22

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 28

dijaga. Demikian juga pelaksanaan gelar kekuatan dilaksanakan di daerah ALKI yaitu dengan aplikasi pengembangan Armada menjadi Armada Bernomor, dengan markas di Jakarta untuk ALKI I, Makassar untuk ALKI II, Ambon untuk ALKI III, dengan Mako di Surabaya.⁸⁷ Peperangan yang cocok dikembangkan adalah peperangan kepulauan (Archipelagic Warfare).

Sesuai dengan diktum *Von Clausewitzs*, faktor yang sangat penting dalam jalannya peperangan adalah pola dukungan antara rakyat, pemerintah dan angkatan bersenjata, yang terkenal dengan “*Trinity*”. Pendapat ini diperkuat Laksda Soewarso yang mengutip teori AT. Mahan⁸⁸ bahwa kemampuan untuk mengamankan garis perhubungan sendiri dan kemampuan mengendalikan garis perhubungan laut yang digunakan lawan merupakan faktor utama atau sebagai kunci bagi penguasaan laut. Dalam bukunya yang berjudul *The Influence of Sea Power Upon History*, Mahan mengatakan bahwa untuk menjadikan bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan-kepentingannya di laut dan membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan-kepentingan yang lebih luas lagi. Kekuatan laut terdiri dari armada niaga, angkatan laut, dan pangkalan, Perkembangan kekuatan laut dipengaruhi oleh 6 elemen yaitu: Geografi, Posisi Wilayah, Luas Wilayah, Jumlah dan Karakter Penduduk, Watak bangsa dan Sikap pemerintah.

Demikian juga keberhasilan TNI AL mewujudkan AL yang BKP disamping mengaplikasikan teori strategi Mahan juga tidak akan terlepas dari elemen trinity ini. Disamping itu peran universal AL dunia yaitu polisional, diplomasi dan militer tetap masih akan dominan. Dari peran *universal* tersebut di atas, maka kedepan Angkatan Laut di seluruh dunia termasuk TNI AL perlu meningkatkan kemampuan diplomasi dan polisionil disamping kemampuan militernya sebagai bagian dari *Military Operation Other Than War (MOOTW)* yang akan lebih mengemuka.

⁸⁷ Makalah Arahan KSAL pada acara sarasehan TNI AL, Jakarta, 17 Desember 2003.

⁸⁸ Soewarso MSc, Kumpulan Karangan Tentang Evolusi Pemikiran Masalah Keangkatan Lautan, Jakarta 1986, hal 16

4.3 Transformasi integrasi dari teori Mahan dan Corbett

Guna mewujudkan pencapaian pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut sesuai MEF ditengah keterbatasan dukungan alokasi anggaran pemerintah, maka perlu dilaksanakan strategi pencapaian berupa : Pengadaan Alutsista yang mengutamakan pemberdayaan Industri dalam negeri dan mengupayakan pemanfaatan pinjaman dalam negeri (PDN), peningkatan kemampuan Alutsista yang ada serta penghapusan Alutsista yang sudah tidak efektif lagi dan berusia tua untuk menghindari beban anggaran pemeliharaan.⁸⁹ Intinya Corbett dan Mahan sama. TNI AL harus lebih kuat dari AL Malaysia. TNI harus lebih kuat dari TDM atau minimal sama. Agar supaya lebih unggul, maka modernisasi senjatanya (alutsista), daya tembak daya tempur, kepemimpinan, moral prajurit harus baik dan semangat juangnya.

Berikut merupakan lampiran komposisi kekuatan MEF⁹⁰

Tabel 4.1: KOMPOSISI KEKUATAN MEF

No	JENIS	KELAS	JML	KEMAMPUAN	KET
I. Kekuatan Subkogasgabfib (1 BTP) jumlah : 24 KRI, 8 Pesud, 100 Ranpur Mar, 3 Tim Passus					
1.	Angkut Tank (AT)	TSK	6	Peperangan Amfibi, Beaching Tempur, Rju	
2.	Markas (MA)	MLT	1	Markas, Heli Deck dan K4IPP	
3.	Landing Platform Dock (LPD)	SBY	2	Angkut Personel, Ranpur dan Heli Deck	
4.	Bantu Angkut Pasukan (BAP)	KMB	1	Angkut Personel dan Heli	

⁸⁹ Mabasal, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: Perkasal/39/V/2009 tentang Kebijakan Dasar Pembangunan TNI Angkatan Laut Menuju Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force)

⁹⁰ Mabasal, Sublampiran A Peraturan Kasal, Jakarta, 2009

No	JENIS	KELAS	JML	KEMAMPUAN	KET
				Deck	
5.	Bantu Cair Minyak (BCM)	ARN	2	Dukung BB, AT, ML dan Heli Deck	
6.	Bantu Rumah Sakit (BRS)	SHS	1	Mampu Operasi Medis dan Heli Deck	
7.	Bantu Tunda Samudera (TDS)	SPT	1	Tunda Samudera	
8.	Buru Ranjau (BR)	PRE	2	TPR	
9.	Perusak Kawal Rudal (PKR)	AMY, FTH	6	AKPA, AKS, PAU	
10.	Perusak Kawal (PK)	PTM	2	AKS Terbatas, Hanud, Peranjauan	24
11.	Heli Angkut	Bell	4	GKK Lintas Heli	
12.	Pesawat Angkut Taktis	NC-212	2	Junpur, FLIR, GPS	
13.	Heli Escort		2		8
14.	Tankfib	BMP-3F & AMX	17	Peperangan amfibi, peperangan darat	
15.	Ranratfib	Pansam	50	Peperangan amfibi, angkut Personel	
16.	Kapa	K-61 (R)	10	Peperangan Amfibi, angkut Persmat	
17.	Kendaraan Arhanud	BVP-2	14	Pertahanan Anti Udara	
18.	Meriam	105/122	9	Peperangan Darat	100
19.	Pasukan Laut Khusus TNI Angkatan Laut	Paska/Taifib/ Denjaka	3	Spionase, sabotase, infiltrasi, pul data intel dll	3 Tim
II. Kekuatan Unsur PGPLL Timur/Barat jumlah : 2 X (19 KRI, 6 Pesud, 2 Tim Paslasus)					

No	JENIS	KELAS	JML	KEMAMPUAN	KET
1.	Perusak Kawal Rudal (PKR)	AMY, DPN	4	AKPA, AKS, PAU, Pernika	
2.	Kapal Cepat Rudal (KCR)	MDU	8	AKPA	
3.	BCM	ARN	1	Bekul BB, ML, AT	
4.	Kapal Selam (KS)	CKA	2	Intai dan Pukul (Tpo, Rudal)	
5.	PR/BR	PRE	2	TPR dan Peranjauan	
6.	Trimaran	X3K	2	Opssus dan Peranjauan	19
7.	Pesud Patmar	CN-235	2	Pengintaian udara	
8.	Heli AKPA/AKS	NBO/Bell	4	Rudal, Tpo, Sonobuoy, Dip Sonar, Radar	6
9.	Pasukan Laut Khusus TNI Angkatan Laut	Paska/Taifib/Denjaka	2	Sabotase dan Pul data Intel	2 tim
III. Kekuatan Subkogasgabatmin (1 BTD TNI AD) jumlah : 16 KRI, 2 Pesud					
1.	AT	TSK	5	Peperangan Amfibi, Beaching Tempur	
2.	LPD / MA	SBY	1	Angkut Personel, Ranpur dan Heli Deck	
3.	BAP	NSN	1	Angkut Personel	
4.	PK	PTM	5	AKPA, AKS, Hanud	
5.	BCM	SRG	1	Dukung BB, AT, ML c Heli Deck	
6.	TDS	SPT	1	Tunda Samudera	
7.	ASG	NSU	1	Angkut Alat Berat / M	
8.	BU	KMT	1	Angkut Munisi	16
9.	Heli Angkut Taktis	Bell	2	Duk Taktis	2
IV. PPRC : 1 BTP (1.300 Personel) Jumlah : 10 KRI, 6 Pesud, 35 Ranpur, 2 Tim Paslasus					
1.	AT	TSK	4	Peperangan Amfibi, Beaching Tempur	

No	JENIS	KELAS	JML	KEMAMPUAN	KET
2.	LPD/MA	SBY	1	Angkut Personel, Ranpur dan Heli Deck	
3.	BCM	ARN	1	Bekul BB, ML, AT	
4.	PKR	AMY, DPN	2	AKPA, AKS, PAU dan Pernika	
5.	PK	PTM	2	AKPA, AKS, Hanud	10
6.	Heli Angkut	Bell	2	Duk Personel	
7.	Heli AKS/AKPA	NBO/Bell	2		
8.	Heli Escort		2		6
9.	Tankfib	BMP-3F & AMX	5	Peperangan amfibi, peperangan darat	
10.	Ranratfib	Pansam	15	Peperangan amfibi, angkut Personel	
11.	Kendaraan Arhanud	BVP-2	5	Pertahanan Anti Udara	
12.	Kapa	K-61 (R)	5	Peperangan Amfibi, angkut Persmat	
13.	Rocket Multi Laras	RM-70 Cal 122	5	Peperangan Darat	35
14.	Paslasus TNI AL	Paska/Taifib/ Denjaka	2	Sabotase dan Pul Data Intel	2
V. Kekuatan Operasi Yang Bersifat Perbantuan jumlah : 19 KRI, 17 Pesud & 50 Ranpur					
1.	AT	TSK	4	Angkut Pers, Ranpur dan Heli Deck	
2.	BAP	KBI	2	Angkut Pers & Heli Deck	
3.	KCR / FPB-M	HIU	4	AKPA, Hanud	
4.	BHO	BJ	3	Ocean Going, Coastal	
5.	LAT	DWR,KDA, ARSA	3	Latih Dasar, Latih Tempur	
6.	BRS	AT Container Medis	1	Medis dan Heli Deck	
7.	BU	KMT	1	Angkut Munisi dan Pal lainnya	

No	JENIS	KELAS	JML	KEMAMPUAN	KET
8.	ASG	NSU	1	Angkut Albes	19
9.	Pesud Patmar	CN-235	2	Intai taktis	
10.	Pesud Angkut	CN-235	5	Angkut Pers, Mat	
11.	Pesud Latih	TB-10	6	Latih Dasar	
12.	Heli Latih	Collibri	4	Latih dasar, Heli Taktis	17
13.	Tankfib	BMP-3F & AMX	46	Peperangan amfibi, peperangan darat	Cad Fib 17 Cad PPRC 5
14.	Ranratfib	Pansam	15	Peperangan amfibi, angkut Personel	
15.	Kendaraan Arhanud	BVP-2	10	Pertahanan Anti Udara	
16.	Kapa	K-61 (R)	10	Peperangan Amfibi, angkut persmat	
17.	Rocket Multi Laras	RM-70 Cal 122	5	Peperangan Darat	86
VI. Kekuatan Gugus Tugas Kamla/Gakkum jumlah : 44 KRI, 9 Pesud & 18 CSS / IMSS					
1.	FPB/PC	KKP/PC-60	44	Patroli/AKPA/Hanud	44
2.	Pesud Patmar	CN -235	9	Intai/TRU	9
3.	Radar Pantai/CSS	IMSS	18	Radar Surveillance	18
VII. Cadangan Kekuatan Pasukan MARINIR					
1.	BTP	1.745 Personel	1	Pasukan Pendarat + 50 Ranpur	
2.	Yonif Siaga Ibu Kota	250 Personel	1	PAM VVIP dan PHH + 15 Ranpur	
3.	Yon Tugas Kamdagri/lain	914 Personel	1	PAM Obvit dan PRCPB + 50 Ranpur	
VIII. Kekuatan Pangkalan, Peningkatan 6 Pangkalan strategis & pembangunan 10 CSS.					
1.	Lantamal IV TPI	Kelas A		Faslabuh dan Fasbekul	

No	JENIS	KELAS	JML	KEMAMPUAN	KET
2.	Lantamal V Surabaya	Kelas A		Faslabuh untuk Trimaran	
3.	Lantamal VI Makasar	Kelas A		Faslabuh dan Fasbekul	
4.	Lantamal VIII Manado	Kelas A		Faslabuh dan Fasbekul	
5.	Lanal Palu	Kelas B		Faslabuh dan Fasbekul	
6.	Lanal Tarakan	Kelas B		Faslabuh dan Fasbekul	
7.	Lanal Sangatta	Kelas C		Faslabuh dan Fasbekul	
8.	CSS	Posal Satrad	10	8 di Laut Sulawesi, 2 di Laut Halmahera.	
IX. Kekuatan Yonmarhanlan, Peningkatan kemampuan Yonmarhanlan di Lantamal:					
1.	Lantamal III Jakarta	Kelas A		Dilengkapi Mer PSU, Rudal AL-1, Mer 20 mm, Ranmor & Rantis	
2.	Lantamal IV TPI	Kelas A		Dilengkapi Mer PSU, Rudal AL-1, Mer 20 mm, Ranmor & Rantis	
3.	Lantamal V Surabaya	Kelas A		Dilengkapi Mer PSU, Rudal AL-1, Mer 20 mm, Ranmor & Rantis	
4.	Lantamal VI Makasar	Kelas A		Dilengkapi Mer PSU, Rudal AL-1, Mer 20 mm, Ranmor & Rantis	
5.	Lantamal VIII Manado	Kelas A		Dilengkapi Mer PSU, Rudal AL-1, Mer 20 mm, Ranmor & Rantis	

Baik Mahan ataupun Corbett keduanya dipakai SPLN, namun keduanya tidak secara penuh.⁹¹ Sebenarnya SPLN adalah Naval Strategy yang lebih tepat sesuai teori Corbett, yaitu bagian dari strategi maritim. Stramar itu sendiri merupakan pengerahan dari seluruh sumber daya maritim untuk memenangkan perang dilaut. Sedangkan strategi AL merupakan bagian dari strategi maritim. Untuk menjalankan strategi maritim di Ambalat kiranya tidak bisa hanya mengandalkan AL saja dengan Gun boat diplomacy-nya tapi harus menggunakan comprehensive strategy sesuai dengan Mahan yaitu D (politik) IME.⁹² Oleh karena itu pemerintah (presiden) tidak boleh hanya mengandalkan kebijakan luar negeri melalui Kemenlu saja tapi bersamaan diplomasi (politik) dan diplomasi militer (gun boat diplomacy).

Sebenarnya SPLN ini masih berupa Skep Kasal, belum diakui sebagai strategi pertahanan maritim Indonesia yang menggerakkan seluruh komponen maritim, untuk menghadapi provokasi AL Malaysia di Ambalat.

Dari penjelasan mengenai kedua teori diatas, dapat dicermati juga mengenai *Balance of Power Contest* (Hettne, 2002). Ini adalah jenis ancaman yang muncul karena adanya keinginan antara negara-negara di kawasan untuk menguasai aspek-aspek tertentu, misalnya sumber daya dan hegemoni. Hal tersebut menyebabkan para aktor saling berlomba dalam memenangkan kepentingannya dan tidak menempuh upaya kerjasama. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perebutan sumber daya serta konflik kepentingan akan selalu menjadi potensi ancaman bagi setiap negara terutama dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di wilayah perbatasan.

⁹¹ Mahan vs Corbett, 2006 <http://cominganarchy.com/2006/01/03/mahan-vs-corbett/>

⁹² *Ibid.*